ISIHUMOR
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
http://www.putrapublisher.org/ojs/index.php/isihumor Publisher: putrapublisher.org

ISIHUMOR: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Vol.4 No 4 Oktober 2026, Hlm. 1756-1769

STRATEGI OPTIMALISASI PERAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM MEMPERKUAT KETAHANAN MARITIM NASIONAL DI TENGAH DINAMIKA INDO-PASIFIK

Dadang Kuncoro[1], Mardiyanto[2], Anton Y[3]
[1]Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Cipulir Kebayoran Lama Jakarta, Indonesia; dadangkuncoro923@gmail.com
[2]Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Cipulir Kebayoran Lama Jakarta, Indonesia; mardiyantoesti69@gmail.com
[3]Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Cipulir Kebayoran Lama Jakarta, Indonesia; yudhantoro74@gmail.com
Corresponden E-mail :dadangkuncoro923@gmail.com

INFO ARTIKEL
Diterima: 16 Juli 2026
Direvisi: 27 Juli 2026
Disetujui: 18 September 2026
Tersedia Daring: 30 Oktober 2026

Kata Kunci:
Indonesian Navy
maritime resilience
maritime security
sea power
strategic environment

ABSTRAK

Dinamika lingkungan strategis Indo-Pasifik meningkatkan kompleksitas tantangan terhadap keamanan dan ketahanan maritim Indonesia. Kompetisi strategis antarnegara, kejahatan transnasional, eksploitasi sumber daya secara ilegal, ancaman siber, serta pola ancaman hibrida menuntut respons yang melampaui pendekatan pertahanan konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dinamika lingkungan strategis terhadap ketahanan maritim nasional, mengidentifikasi peran strategis TNI Angkatan Laut (TNI AL), dan merumuskan strategi optimalisasi peran tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, dokumen kebijakan, dan literatur akademik. Data dianalisis dengan analisis isi melalui pengelompokan informasi berdasarkan karakter ancaman, fungsi TNI AL, kebutuhan kapabilitas, dan dimensi ketahanan maritim. Hasil analisis menunjukkan bahwa ancaman nontradisional terutama menuntut penguatan pengawasan, penegakan hukum sesuai kewenangan, dan koordinasi lintas lembaga; ancaman hibrida menuntut integrasi informasi, kemampuan siber, teknologi, dan interoperabilitas; sedangkan kompetisi strategis antarnegara menuntut daya tangkal, kesiapan operasi, serta diplomasi Angkatan Laut. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa ketahanan maritim tidak dapat diperkuat melalui modernisasi alutsista secara terpisah, melainkan membutuhkan keterpaduan antara informasi, kekuatan, teknologi, sumber daya manusia, diplomasi, dan tata kelola. Sintesis temuan menghasilkan enam pilar optimalisasi, yaitu Maritime Domain Awareness, pembangunan kekuatan berbasis kapabilitas, interoperabilitas, transformasi teknologi dan sumber daya manusia, naval diplomacy, serta sinergi keamanan maritim nasional. Model ini memberikan kerangka analitis untuk menyelaraskan pengembangan peran TNI AL dengan karakter ancaman dan kebutuhan ketahanan maritim Indonesia.

Keywords:
TNI Angkatan Laut
ketahanan maritim
keamanan maritim
sea power
lingkungan strategis

ABSTRACT

The dynamics of the Indo-Pacific strategic environment have increased the complexity of challenges to Indonesia's maritime security and resilience. Strategic competition among states, transnational crime, illegal resource exploitation, cyber threats, and hybrid threat patterns require responses that extend beyond conventional defense. This study aims to analyze the influence of strategic environmental dynamics on national maritime resilience, identify the strategic role of the Indonesian Navy (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut or TNI AL), and formulate strategies to

optimize that role. The study employs a qualitative descriptive-analytical method through a literature review of regulations, policy documents, and academic literature. The data are examined using content analysis by categorizing information according to threat characteristics, the functions of the Indonesian Navy, capability requirements, and dimensions of maritime resilience. The findings show that non-traditional threats primarily require stronger maritime surveillance, law enforcement within the relevant jurisdiction, and interagency coordination; hybrid threats require integrated information, cyber capabilities, technology, and interoperability; while interstate strategic competition requires credible deterrence, operational readiness, and naval diplomacy. The analysis indicates that maritime resilience cannot be strengthened through defense-equipment modernization in isolation. It requires an integrated combination of information, force capabilities, technology, human resources, diplomacy, and governance. The synthesis produces six pillars for optimizing the Indonesian Navy's role: Maritime Domain Awareness, capability-based force development, interoperability, technology and human capital transformation, naval diplomacy, and national maritime security synergy. This model provides an analytical framework for aligning the development of the Indonesian Navy's role with the characteristics of emerging threats and Indonesia's maritime resilience requirements.

© 2026
This is an open access article under CC-BY license

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kepentingan nasionalnya memiliki keterkaitan erat dengan domain maritim. Laut bukan hanya ruang geografis yang menghubungkan pulau-pulau Indonesia, tetapi juga merupakan ruang strategis bagi perdagangan, komunikasi, pemanfaatan sumber daya, mobilitas, diplomasi, dan pertahanan negara. Oleh karena itu, kemampuan negara dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan pemanfaatan ruang maritim menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai dasar dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. Rezim negara kepulauan dalam UNCLOS memberikan kerangka hukum mengenai garis pangkal kepulauan, perairan kepulauan, laut teritorial, serta hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut. Konsekuensinya, pengelolaan kepentingan maritim Indonesia harus memperhatikan dimensi kedaulatan, hak berdaulat, yurisdiksi, serta kewajiban berdasarkan hukum internasional (United Nations, 1982).

Posisi geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik memberikan nilai geostrategis sekaligus menghadirkan kerentanan. ASEAN (2019) mengidentifikasi kawasan Asia-Pasifik dan Samudra Hindia sebagai kawasan yang mengalami perubahan geopolitik dan geostrategis seiring pertumbuhan kekuatan ekonomi dan militer. Perkembangan tersebut menciptakan peluang kerja sama, tetapi juga dapat

meningkatkan ketidakpercayaan, salah perhitungan, dan kompetisi antaraktor. Pada domain maritim, perubahan tersebut terlihat melalui semakin kompleksnya isu keamanan. Selain potensi konflik bersenjata antarnegara, negara-negara kawasan menghadapi kejahatan transnasional, perompakan, perdagangan manusia dan narkotika, eksploitasi sumber daya secara ilegal, ancaman siber, pencemaran lingkungan, bencana, serta berbagai bentuk ancaman yang dapat melibatkan aktor negara maupun nonnegara. ASEAN menempatkan penyelesaian sengketa secara damai, keamanan dan keselamatan maritim, kebebasan navigasi, kejahatan transnasional, perompakan, pengelolaan sumber daya, dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari agenda kerja sama maritim kawasan (ASEAN, 2019).

Perubahan karakter ancaman tersebut menunjukkan bahwa keamanan maritim tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai persoalan pertahanan terhadap ancaman militer. Bueger (2015a) menjelaskan bahwa *maritime security* memiliki hubungan dengan berbagai konsep, termasuk *sea power*, *marine safety*, *blue economy*, dan *resilience*. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keamanan maritim bersifat multidimensional dan membutuhkan keterlibatan berbagai instrumen negara. Dalam konteks kebijakan pertahanan Indonesia, perkembangan ancaman perlu dianalisis secara hati-hati. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 menggunakan klasifikasi ancaman militer, nonmiliter, dan hibrida, serta membedakan ancaman berdasarkan tingkat aktualitasnya. Klasifikasi tersebut tidak identik dengan konsep *traditional security* dan *non-traditional security* dalam literatur akademik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan istilah tradisional dan nontradisional sebagai perangkat analitis dalam studi keamanan, sementara klasifikasi militer, nonmiliter, dan hibrida digunakan ketika merujuk pada kerangka kebijakan pertahanan Indonesia (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Perubahan lingkungan strategis tersebut memberikan konsekuensi langsung terhadap peran TNI AL. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, TNI AL melaksanakan tugas matra laut di bidang pertahanan; menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut sesuai hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan; melaksanakan diplomasi Angkatan Laut untuk mendukung kebijakan politik luar negeri pemerintah; membangun dan mengembangkan kekuatan matra laut; serta memberdayakan wilayah pertahanan laut (Republik Indonesia, 2025). Spektrum tugas tersebut menunjukkan bahwa peran TNI AL bersifat multidimensional. TNI AL tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peperangan, tetapi juga mempunyai fungsi konstabulari dan diplomasi. Perspektif tersebut sejalan dengan pemikiran Till (2018) yang menunjukkan bahwa angkatan laut modern mempunyai peran lebih luas daripada fungsi tempur, termasuk *naval diplomacy* dan pemeliharaan *good order at sea*.

Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana TNI AL dapat mengoptimalkan peran tersebut ketika karakter ancaman, teknologi, dan lingkungan operasi terus berubah. Luasnya ruang maritim Indonesia, keterbatasan sumber daya, perkembangan sistem nirawak dan teknologi informasi, kebutuhan pertukaran informasi, serta kompleksitas tata kelola keamanan laut mengharuskan adanya pendekatan yang lebih adaptif. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat pertanyaan utama:

bagaimana optimalisasi peran TNI AL dalam memperkuat ketahanan maritim nasional menghadapi dinamika lingkungan strategis? Pertanyaan utama tersebut dijabarkan menjadi tiga pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana dinamika lingkungan strategis memengaruhi ketahanan maritim nasional; bagaimana posisi dan peran strategis TNI AL dalam memperkuat ketahanan maritim nasional; serta bagaimana strategi optimalisasi peran TNI AL untuk menghadapi perubahan spektrum ancaman maritim. Penelitian bertujuan menganalisis perkembangan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap ketahanan maritim Indonesia, mengidentifikasi peran strategis TNI AL, serta merumuskan strategi optimalisasi peran TNI AL dalam memperkuat ketahanan maritim nasional.

Konsep *sea power* memberikan landasan penting dalam memahami hubungan antara kekuatan laut dan kepentingan nasional. Dalam perkembangannya, *sea power* tidak hanya dipahami sebagai kemampuan armada untuk memenangkan pertempuran laut, tetapi mencakup kemampuan negara menggunakan laut untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Till (2018) menjelaskan bahwa laut mempunyai fungsi sebagai sumber daya, medium transportasi, pertukaran informasi, serta ruang strategis. Dengan demikian, kekuatan maritim suatu negara merupakan kombinasi berbagai elemen yang tidak terbatas pada kekuatan tempur Angkatan Laut.

Dalam konteks tersebut, Angkatan Laut memiliki setidaknya tiga fungsi yang relevan, yaitu fungsi militer, konstabulari, dan diplomasi. Fungsi militer berkaitan dengan kemampuan menggunakan atau mengancam penggunaan kekuatan untuk mempertahankan kepentingan negara. Fungsi konstabulari berkaitan dengan pemeliharaan ketertiban dan penegakan hukum sesuai kewenangan. Fungsi diplomasi menggunakan kekuatan dan kehadiran Angkatan Laut untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri.

Kerangka tersebut relevan dalam menganalisis TNI AL karena ketiga dimensi tersebut tercermin dalam tugas TNI AL berdasarkan hukum nasional. Konsep keamanan maritim tidak mempunyai satu definisi universal. Bueger (2015) menunjukkan bahwa keamanan maritim dapat dipahami melalui hubungan dengan empat bidang utama, yaitu *sea power*, *marine safety*, *blue economy*, dan *resilience*. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keamanan maritim tidak hanya berhubungan dengan ancaman militer. Keamanan jalur perdagangan, keselamatan pelayaran, kejahatan transnasional, pemanfaatan sumber daya, lingkungan laut, dan kemampuan negara mempertahankan fungsi maritimnya juga menjadi bagian dari diskursus keamanan maritim. Implikasinya, keamanan maritim merupakan persoalan lintas sektor. Kompleksitas ancaman di laut membuat efektivitas tata kelola bergantung pada pembagian peran yang jelas, koordinasi antarlembaga, pertukaran informasi, dan kemampuan menghubungkan sumber daya yang tersebar pada berbagai institusi. Karena itu, interoperabilitas kelembagaan merupakan bagian penting dari respons keamanan maritim yang adaptif (Bueger & Edmunds, 2017; Wibawa et al., 2021).

Dalam penelitian ini, ketahanan maritim didefinisikan secara operasional sebagai kemampuan negara dan sistem maritim nasional untuk mengantisipasi, menghadapi, beradaptasi terhadap, mempertahankan fungsi strategis selama gangguan, serta memulihkan diri dari ancaman yang memengaruhi kepentingan nasional di domain

maritim. Ketahanan maritim dengan demikian lebih luas daripada sekadar kemampuan menghilangkan ancaman. Konsep ini menekankan kemampuan sistem nasional untuk tetap berfungsi dalam kondisi tekanan dan beradaptasi terhadap perubahan. Ketahanan maritim nasional dalam penelitian ini dianalisis melalui empat dimensi: pertahanan dan kedaulatan; keamanan dan penegakan hukum; keberlangsungan kepentingan ekonomi dan sumber daya; serta kapasitas kelembagaan dan adaptasi.

Pembedaan ancaman tradisional dan nontradisional harus ditempatkan secara tepat agar tidak menimbulkan kerancuan. Ancaman tradisional pada umumnya berkaitan dengan keamanan negara dan penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan militer terhadap kedaulatan, integritas wilayah, dan keberlangsungan negara. Perang antarnegara, agresi bersenjata, dan eskalasi konflik militer merupakan contoh utamanya. Sebaliknya, ancaman nontradisional melampaui perang konvensional antarnegara dan sering mempunyai karakter lintas batas serta melibatkan aktor nonnegara maupun negara. Dalam domain maritim, bentuknya dapat meliputi perompakan, terorisme maritim, perdagangan manusia, penyelundupan narkotika, kejahatan terorganisasi lintas negara, bencana, degradasi lingkungan, dan sejumlah bentuk ancaman siber. Namun, klasifikasi tersebut tidak bersifat absolut. Aktor negara dapat menggunakan instrumen nonmiliter, sedangkan aktor nonnegara dapat memiliki kemampuan yang sebelumnya diasosiasikan dengan negara. Perkembangan tersebut berhubungan dengan konsep ancaman hibrida, yaitu penggunaan kombinasi instrumen militer dan nonmiliter untuk menghasilkan efek strategis. Operasi siber, disinformasi, tekanan ekonomi, penggunaan aktor proksi, serta penggunaan kekuatan terbatas dapat dikombinasikan sehingga batas antara situasi damai, kompetisi, dan konflik menjadi semakin kabur.

Dalam konteks kebijakan pertahanan Indonesia, istilah tersebut harus dibedakan dari klasifikasi nasional. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 menggunakan kategori ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman hibrida (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015). Karena dokumen tersebut diterbitkan pada 2015, penilaiannya mengenai ancaman "nyata" atau "belum nyata" harus dipahami sebagai penilaian berdasarkan konteks strategis pada periode penyusunannya, bukan secara otomatis dianggap menggambarkan situasi tahun 2026.

Kajian Bueger (2015a) memberikan landasan konseptual penting dengan menjelaskan keamanan maritim sebagai konsep multidimensional yang menghubungkan sea power, keselamatan maritim, ekonomi biru, dan ketahanan. Namun, kajian tersebut berfokus pada perumusan konsep keamanan maritim dan belum secara khusus menguraikan bagaimana perubahan lingkungan strategis diterjemahkan menjadi kebutuhan pengembangan kapabilitas Angkatan Laut suatu negara kepulauan. Bueger (2015b) membahas Maritime Domain Awareness (MDA) di Asia Tenggara dan menekankan pentingnya pertukaran informasi serta koordinasi antarlembaga. Keterbatasannya, pembahasan MDA lebih menitikberatkan pada dimensi kesadaran domain maritim dan kerja sama informasi, belum mengintegrasikannya dengan pembangunan kekuatan, kesiapan sumber daya manusia, diplomasi Angkatan Laut, dan tata kelola keamanan maritim dalam satu kerangka optimalisasi. Sementara itu, Till (2018) menyediakan kerangka sea power yang menghubungkan fungsi militer, diplomasi

Angkatan Laut, dan pemeliharaan ketertiban di laut. Kerangka ini menjelaskan keluasan fungsi Angkatan Laut, tetapi tidak secara spesifik merumuskan strategi optimalisasi TNI AL berdasarkan karakter ancaman dan kebutuhan ketahanan maritim Indonesia.

ASEAN (2019) dan ASEAN (2023) memberikan perspektif regional dengan menempatkan kerja sama maritim, keamanan jalur komunikasi laut, MDA, keselamatan navigasi, kejahatan transnasional, serta pengelolaan sumber daya sebagai bagian penting dari arsitektur keamanan kawasan. IISS (2024) menunjukkan bahwa kompetisi kekuatan besar, kemitraan keamanan, dan perkembangan teknologi pertahanan turut membentuk lingkungan operasi Indo-Pasifik. Sejumlah kajian tersebut telah menjelaskan dimensi keamanan maritim, kerja sama regional, MDA, dan sea power, tetapi masih menyisakan ruang untuk menghubungkan secara sistematis karakter ancaman Indo-Pasifik dengan mandat, fungsi, dan kebutuhan transformasi TNI AL. Research gap penelitian ini terletak pada belum terintegrasinya pembahasan mengenai perubahan spektrum ancaman, kebutuhan kapabilitas operasional, dan tata kelola keamanan maritim ke dalam satu model optimalisasi peran TNI AL yang berorientasi pada ketahanan maritim nasional. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model enam pilar yang menghubungkan kebutuhan informasi dan deteksi dini, pembangunan kekuatan berbasis kapabilitas, interoperabilitas, transformasi teknologi dan sumber daya manusia, diplomasi Angkatan Laut, serta sinergi keamanan maritim nasional. Model tersebut diperoleh melalui pengelompokan temuan literatur berdasarkan hubungan antara karakter ancaman, fungsi TNI AL, dan empat dimensi ketahanan maritim yang digunakan dalam penelitian. Kontribusi strategisnya adalah menyediakan kerangka analitis untuk menentukan prioritas penguatan TNI AL tanpa mengabaikan pembagian kewenangan antarlembaga.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan seluruhnya merupakan data sekunder; penelitian ini tidak menggunakan wawancara, observasi lapangan, atau data primer lainnya. Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pertahanan dan kelautan Indonesia, dokumen ASEAN dan organisasi internasional, buku akademik, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan sea power, keamanan maritim, Maritime Domain Awareness (MDA), dan ketahanan maritim. Dokumen dipilih secara purposif berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) relevansi langsung dengan lingkungan strategis Indo-Pasifik dan keamanan maritim; (2) keterkaitan dengan mandat, fungsi, atau kebijakan TNI AL dan tata kelola keamanan laut Indonesia; (3) kredibilitas penerbit, yang mencakup lembaga resmi, organisasi internasional, penerbit akademik, dan jurnal ilmiah; serta (4) kecukupan informasi untuk menjelaskan hubungan antara karakter ancaman dan kebutuhan kapabilitas maritim. Regulasi dan dokumen kebijakan diprioritaskan sebagai dasar untuk mengidentifikasi mandat serta arah kebijakan nasional, sedangkan literatur akademik digunakan untuk membangun kerangka konseptual dan membandingkan temuan penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, menyeleksi, dan mendokumentasikan sumber sesuai fokus penelitian. Analisis dilakukan menggunakan analisis isi (content analysis) secara kualitatif. Tahapannya meliputi: (1) identifikasi unit informasi yang berkaitan dengan ancaman maritim, fungsi

TNI AL, dan ketahanan maritim; (2) pengodean serta pengelompokan informasi ke dalam kategori ancaman, fungsi kelembagaan, kebutuhan kapabilitas, dan dimensi ketahanan; (3) perbandingan antarsumber untuk menemukan pola, kesesuaian, dan perbedaan; (4) interpretasi hubungan antara dinamika lingkungan strategis, konsekuensi operasional, dan kebutuhan optimalisasi; serta (5) sintesis kategori menjadi enam pilar strategi. Dengan prosedur tersebut, enam pilar tidak ditetapkan sebagai daftar rekomendasi sejak awal, melainkan dirumuskan dari pengelompokan dan interpretasi temuan literatur berdasarkan mandat TNI AL dan kebutuhan ketahanan maritim nasional.

3. Hasil dan Pembahasan

Indo-Pasifik berkembang menjadi ruang strategis yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, dan militer tinggi. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific menunjukkan bahwa perubahan geopolitik dan geostrategis di kawasan menciptakan peluang sekaligus tantangan, termasuk risiko meningkatnya ketidakpercayaan dan salah perhitungan (ASEAN, 2019). Kondisi tersebut relevan bagi Indonesia karena jalur pelayaran, ruang yurisdiksi, sumber daya laut, dan interaksi kekuatan kawasan menjadikan domain maritim sebagai salah satu ruang utama persaingan strategis. Berdasarkan analisis dokumen dan literatur, dinamika tersebut menghasilkan tiga kelompok tantangan yang memiliki konsekuensi berbeda terhadap ketahanan maritim dan kebutuhan peran TNI AL, yaitu ancaman nonmiliter dan keamanan nontradisional, ancaman hibrida dan multidomain, serta tekanan kompetisi strategis antarnegara. Ketiganya tidak berdiri sendiri: aktivitas ilegal dapat berlangsung bersamaan dengan tekanan geopolitik, sementara gangguan teknologi dapat memperbesar dampak insiden keamanan di laut. Oleh sebab itu, respons TNI AL memerlukan kombinasi kemampuan pertahanan, pengawasan, koordinasi, dan diplomasi, bukan hanya peningkatan kekuatan tempur.

Ancaman Nonmiliter dan Keamanan Nontradisional

Ancaman keamanan nontradisional mempunyai karakter beragam dan sering kali bersifat transnasional. Dalam lingkungan maritim, ancaman dapat berupa perompakan, terorisme maritim, perdagangan manusia, penyelundupan narkotika, eksploitasi sumber daya secara ilegal, pencemaran laut, bencana, serta gangguan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran. ASEAN (2019) memasukkan kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia dan narkotika, perompakan, serta perampokan bersenjata terhadap kapal sebagai persoalan yang membutuhkan kerja sama maritim. Karakter lintas batas tersebut berarti respons nasional semata sering tidak mencukupi. Dibutuhkan kerja sama bilateral maupun multilateral, pertukaran informasi, mekanisme koordinasi, dan kemampuan membangun gambaran situasi maritim bersama. Temuan ini menunjukkan bahwa ancaman nontradisional terutama menekan dimensi keamanan dan penegakan hukum serta keberlangsungan kepentingan ekonomi dan sumber daya dalam ketahanan maritim. Konsekuensinya, peran TNI AL perlu dioptimalkan melalui penguatan MDA untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan, interoperabilitas dan sinergi antarlembaga untuk memastikan respons sesuai kewenangan, serta diplomasi Angkatan Laut untuk mendukung kerja sama lintas batas. Dengan demikian, fungsi TNI AL dalam menghadapi ancaman tersebut perlu dijalankan sebagai bagian dari sistem keamanan maritim nasional, bukan sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penegakan hukum di laut.

Ancaman Hibrida dan Multidomain

Perkembangan teknologi membuat pemisahan ancaman militer dan nonmiliter menjadi semakin kompleks. Operasi siber, disinformasi, tekanan ekonomi, aktivitas aktor proksi, gangguan sistem navigasi atau komunikasi, dan pengerahan kekuatan terbatas dapat digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan efek strategis. Karakter ancaman hibrida menimbulkan tantangan karena aktivitas dapat berlangsung di bawah ambang konflik terbuka. Atribusi aktor dan penentuan respons menjadi lebih kompleks dibandingkan menghadapi serangan konvensional. Implikasi analitisnya adalah bahwa ancaman hibrida tidak cukup dihadapi melalui kesiapan platform tempur, sebab gangguan terhadap informasi, komunikasi, dan sistem pendukung dapat melemahkan kemampuan operasi sebelum terjadi konfrontasi fisik. Kondisi ini berkaitan langsung dengan dimensi pertahanan dan kedaulatan serta kapasitas kelembagaan dan adaptasi. Karena itu, kebutuhan optimalisasi TNI AL mencakup integrasi sensor dan jaringan informasi, penguatan kemampuan siber serta electronic warfare, pengembangan sistem nirawak, interoperabilitas komando-kendali, dan peningkatan kompetensi personel. Kebutuhan tersebut menjadi dasar bagi pilar MDA, pembangunan kekuatan berbasis kapabilitas, interoperabilitas, serta transformasi teknologi dan sumber daya manusia.

Ketahanan Maritim sebagai Kepentingan Strategis Nasional

Ketahanan maritim nasional membutuhkan kemampuan mempertahankan fungsi strategis negara di laut dalam berbagai kondisi. Dalam konteks Indonesia, terdapat empat dimensi yang saling berkaitan. Pertama adalah dimensi pertahanan dan kedaulatan, yaitu kemampuan melindungi wilayah dan kepentingan nasional dari ancaman penggunaan kekuatan. Kedua adalah dimensi keamanan dan penegakan hukum, yaitu kemampuan menjaga ketertiban di laut serta menghadapi aktivitas ilegal berdasarkan pembagian kewenangan yang berlaku. Ketiga adalah dimensi ekonomi dan sumber daya, yaitu kemampuan memastikan jalur perdagangan, konektivitas, serta pemanfaatan sumber daya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Keempat adalah dimensi kelembagaan dan adaptasi, yaitu kemampuan berbagai institusi negara berbagi informasi, berkoordinasi, serta menyesuaikan strategi dengan perkembangan ancaman. Perpres Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia memberikan kerangka kebijakan nasional yang menunjukkan luasnya dimensi pembangunan kelautan Indonesia (Republik Indonesia, 2017). Dengan demikian, ketahanan maritim bukan semata-mata produk dari kekuatan Angkatan Laut. Ketahanan tersebut merupakan hasil interaksi antara kemampuan pertahanan, penegakan hukum, ekonomi, diplomasi, teknologi, tata kelola, dan masyarakat.

Posisi Strategis TNI AL

Fungsi Militer

Fungsi militer merupakan fungsi fundamental TNI AL sebagai instrumen pertahanan negara pada domain laut. Fungsi tersebut diarahkan untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional serta memberikan daya tangkal terhadap potensi ancaman. Efektivitas fungsi militer tidak hanya bergantung pada kuantitas kapal perang atau persenjataan. Kesiapan alutsista, kualitas personel, dukungan logistik, pangkalan, sensor, jaringan komunikasi, komando-kendali, intelijen, dan kemampuan interoperabilitas secara

kolektif menentukan efektivitas kekuatan. Dalam dinamika Indo-Pasifik, kompetisi strategis dan potensi eskalasi konflik menuntut TNI AL memiliki daya tangkal yang kredibel sekaligus kemampuan mempertahankan kehadiran secara berkelanjutan di wilayah kepentingan nasional. Hal ini menjelaskan mengapa modernisasi perlu didasarkan pada skenario misi dan kebutuhan kapabilitas, bukan semata-mata penambahan jumlah platform. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep sea power kontemporer yang memandang efektivitas Angkatan Laut sebagai hasil interaksi antara platform, teknologi, organisasi, manusia, dan strategi (Till, 2018).

Fungsi Konstabulari

Fungsi konstabulari berkaitan dengan kontribusi TNI AL terhadap penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan di wilayah laut sesuai kewenangan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. UU Nomor 3 Tahun 2025 menegaskan tugas TNI AL untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan (Republik Indonesia, 2025). Karena tata kelola keamanan maritim melibatkan berbagai institusi, pelaksanaan fungsi konstabulari membutuhkan koordinasi yang efektif. Orientasinya bukan pada kompetisi kewenangan, melainkan pada kemampuan membangun respons nasional yang terintegrasi sesuai mandat masing-masing lembaga.

Fungsi Diplomasi

Diplomasi Angkatan Laut merupakan penggunaan kehadiran, interaksi, dan aktivitas kekuatan laut untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri. Dalam praktik kontemporer, instrumennya berada pada spektrum yang luas, mulai dari port visit, latihan dan bantuan kemanusiaan sampai penggunaan kehadiran maritim untuk menyampaikan sinyal strategis secara terukur (Le Mière, 2014). Implementasinya dapat berbentuk *port visit*, latihan bersama, patroli terkoordinasi, pendidikan dan pertukaran personel, *capacity building*, serta forum kerja sama antarangkatan laut. UU Nomor 3 Tahun 2025 secara eksplisit memasukkan diplomasi Angkatan Laut dalam tugas TNI AL (Republik Indonesia, 2025). Dalam perspektif sea power, diplomasi Angkatan Laut memungkinkan kekuatan laut menghasilkan efek strategis tanpa harus menggunakan kekuatan secara langsung. Interaksi, latihan, dan kehadiran maritim dapat membangun kepercayaan dan interoperabilitas sekaligus menyampaikan kepentingan negara. Pengalaman Indonesia di Laut Natuna Utara juga memperlihatkan bahwa instrumen maritim dapat digunakan secara fleksibel untuk mengelola tekanan dan sengketa tanpa selalu mendorong eskalasi terbuka (Putra, 2023; Darwis & Putra, 2022).

Strategi Optimalisasi Peran TNI AL

Penguatan Maritime Domain Awareness

Pilar pertama adalah penguatan Maritime Domain Awareness (MDA). MDA perlu dipahami sebagai kemampuan membangun pemahaman situasi maritim melalui pengumpulan, penggabungan, analisis, dan pertukaran informasi. Karena ancaman maritim melibatkan banyak aktor dan yurisdiksi, efektivitas MDA sangat dipengaruhi oleh mekanisme information sharing dan kemampuan menghubungkan data dengan proses pengambilan keputusan (Bueger, 2015b; Payne, 2023). MDA tidak boleh direduksi menjadi pengadaan radar atau sensor. MDA merupakan kemampuan sistemik untuk

mengumpulkan, mengintegrasikan, menganalisis, mendistribusikan, dan menggunakan informasi maritim sebagai dasar pengambilan keputusan. Penguatan MDA TNI AL dapat dilakukan melalui integrasi radar pantai, AIS, sensor kapal dan pesawat udara, citra satelit, *unmanned systems*, intelijen, serta data yang relevan dari kementerian dan lembaga lainnya. Sasaran akhirnya adalah terciptanya *common operational picture* yang mampu meningkatkan deteksi dini dan memperpendek siklus pengambilan keputusan. Dengan demikian, ukuran keberhasilan MDA bukan semata jumlah sensor, tetapi kualitas data, tingkat integrasi, kecepatan analisis, kemampuan mendeteksi anomali, dan efektivitas informasi dalam mendukung keputusan.

Pembangunan Kekuatan Berbasis Kapabilitas

Pilar kedua adalah pembangunan kekuatan berbasis kapabilitas atau *capability-based force development*. Modernisasi kekuatan tidak cukup dilakukan dengan menambah platform. Pendekatan berbasis kapabilitas dimulai dari identifikasi misi dan skenario ancaman, kemudian menentukan kemampuan yang diperlukan serta kombinasi platform, personel, organisasi, doktrin, sensor, persenjataan, logistik, dan jaringan informasi yang mendukungnya. Pendekatan tersebut penting agar modernisasi menghasilkan kemampuan operasional yang utuh dan bukan sekadar akumulasi alutsista. Dalam konteks geografis Indonesia, aspek *sustainability* juga menjadi penting. Kemampuan beroperasi secara berkelanjutan membutuhkan dukungan pangkalan, pemeliharaan, logistik, rantai pasok, dan kesiapan personel.

Penguatan Interoperabilitas

Pilar ketiga adalah interoperabilitas. Pada tingkat pertama diperlukan interoperabilitas internal TNI AL, yakni integrasi antara unsur kapal, pesawat udara, Marinir, pangkalan, sensor, intelijen, dan komando-kendali. Pada tingkat kedua diperlukan interoperabilitas antarmatra, terutama dalam operasi gabungan TNI. Karakter ancaman multidomain membuat operasi laut tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari domain udara, darat, siber, ruang angkasa, dan informasi. Pada tingkat ketiga diperlukan interoperabilitas antarlembaga, terutama dalam pertukaran informasi dan koordinasi keamanan maritim. Interoperabilitas perlu dibangun melalui latihan, standardisasi prosedur, kompatibilitas komunikasi, mekanisme pertukaran data, dan pembangunan budaya berbagi informasi.

Transformasi Teknologi dan Sumber Daya Manusia

Pilar keempat adalah transformasi teknologi dan sumber daya manusia. Perkembangan *unmanned systems*, kecerdasan buatan, *big data analytics*, sensor, komunikasi satelit, *electronic warfare*, dan teknologi siber berpotensi mengubah karakter operasi laut. Namun, teknologi tidak secara otomatis menghasilkan keunggulan operasional. Efektivitasnya bergantung pada kemampuan personel memahami, mengoperasikan, memelihara, dan mengintegrasikan teknologi ke dalam konsep operasi. Oleh karena itu, pengembangan SDM perlu berjalan sejajar dengan modernisasi alutsista. Pada tingkat pendidikan staf dan komando, pengembangan kompetensi perlu mencakup strategi maritim, geopolitik, *joint and combined operations*, hukum laut, keamanan siber maritim, *electronic warfare*, teknologi nirawak, analisis data, logistik, dan pengambilan keputusan strategis. Dalam konteks Seskoal, orientasi pendidikan perlu terus diarahkan

untuk menghasilkan perwira yang mampu menghubungkan tindakan pada tingkat taktis dengan efek operasional dan tujuan strategis.

Penguatan Naval Diplomacy

Pilar kelima adalah penguatan *naval diplomacy*. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific menekankan dialog, kerja sama, penghormatan terhadap hukum internasional, dan kerja sama maritim sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas kawasan (ASEAN, 2019). TNI AL dapat mendukung pendekatan tersebut melalui latihan bersama, *port visit*, patroli terkoordinasi, pendidikan bersama, pertukaran personel, dan berbagai bentuk *naval engagement*. Diplomasi Angkatan Laut memiliki fungsi ganda. Pada satu sisi, kegiatan tersebut meningkatkan interoperabilitas dan *confidence-building measures*. Pada sisi lain, kehadiran kekuatan laut dapat menunjukkan komitmen dan kepentingan Indonesia secara terukur. Efektivitas *naval diplomacy* perlu dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan strategis nasional, bukan hanya jumlah kegiatan internasional yang dilaksanakan.

Penguatan Sinergi Keamanan Maritim Nasional

Pilar keenam adalah sinergi keamanan maritim nasional. Karakter keamanan maritim yang multidimensional menyebabkan tidak ada satu institusi yang memiliki seluruh kewenangan dan kapabilitas untuk menghadapi semua bentuk ancaman. Oleh karena itu, optimalisasi peran TNI AL tidak harus dimaknai sebagai perluasan seluruh kewenangan keamanan laut kepada TNI AL. Optimalisasi lebih tepat diarahkan pada peningkatan efektivitas mandat TNI AL dan penguatan interoperabilitas dengan institusi lain. Kajian tata kelola keamanan maritim Indonesia menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan dan pola interaksi antarlembaga dapat memengaruhi efektivitas koordinasi, sehingga kejelasan peran dan mekanisme kerja bersama menjadi kebutuhan penting (Wibawa et al., 2021). Sinergi tersebut setidaknya meliputi pertukaran informasi, interoperabilitas sistem pengawasan, koordinasi operasi sesuai kewenangan, mekanisme respons insiden, latihan bersama, serta evaluasi bersama terhadap perkembangan ancaman. Prinsip yang perlu dibangun adalah unity of effort tanpa harus menghilangkan perbedaan mandat institusional.

Model Enam Pilar Optimalisasi

Berdasarkan hasil analisis isi terhadap regulasi, dokumen kebijakan, dan literatur akademik, strategi optimalisasi peran TNI AL dirumuskan ke dalam enam pilar yang saling berkaitan. Pilar pertama, Maritime Domain Awareness, menjawab kebutuhan deteksi dini dan pemahaman situasi terhadap ancaman lintas batas serta aktivitas di wilayah yurisdiksi. Pilar kedua, Capability-Based Force Development, menjawab tuntutan daya tangkal dan kesiapan operasi dalam menghadapi kompetisi strategis serta ancaman militer. Pilar ketiga, Interoperability, diperlukan karena ancaman nontradisional dan multidomain melibatkan banyak institusi serta domain operasi. Pilar keempat, Technology and Human Capital Transformation, menjawab perubahan karakter ancaman akibat teknologi siber, sistem nirawak, dan pengolahan data. Pilar kelima, Naval Diplomacy, mendukung pengelolaan kompetisi, pembangunan kepercayaan, dan kerja sama keamanan kawasan. Pilar keenam, National Maritime Security Synergy, diperlukan untuk mengatasi fragmentasi kewenangan dan memastikan respons nasional berjalan sesuai mandat setiap

institusi. Dengan demikian, enam pilar tersebut merupakan hasil sintesis hubungan antara kelompok ancaman, fungsi TNI AL, dan dimensi ketahanan maritim, bukan sekadar daftar kegiatan yang diharapkan dilakukan. Hubungan keenam pilar bersifat saling memperkuat: MDA menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan; kapabilitas dan teknologi memungkinkan respons; interoperabilitas menghubungkan unsur dan lembaga; sedangkan diplomasi serta sinergi kelembagaan memperluas pilihan respons dan menjaga stabilitas. Model ini menawarkan kontribusi strategis berupa kerangka untuk menyelaraskan prioritas pembangunan TNI AL dengan kebutuhan ketahanan maritim nasional.

Implikasi Strategis

Hasil penelitian menghasilkan beberapa implikasi strategis. Pertama, informasi menjadi salah satu pusat gravitasi operasi maritim modern. Kemampuan mengetahui situasi lebih awal dapat mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas penggunaan unsur. Kedua, pembangunan kekuatan perlu bergeser dari orientasi platform menuju orientasi kapabilitas. Platform tetap penting, tetapi nilai operasionalnya ditentukan oleh integrasinya dengan sensor, jaringan, manusia, logistik, dan doktrin. Ketiga, interoperabilitas berfungsi sebagai *force multiplier*. Dalam kondisi sumber daya terbatas, integrasi sistem dan koordinasi dapat meningkatkan efektivitas tanpa selalu membutuhkan penambahan platform dalam jumlah besar. Keempat, perkembangan teknologi meningkatkan kebutuhan terhadap SDM berkualitas. Digitalisasi bukan mengurangi peran manusia, tetapi meningkatkan tuntutan terhadap kemampuan analitis, teknologi, dan pengambilan keputusan. Kelima, diplomasi Angkatan Laut menjadi semakin penting dalam lingkungan yang kompetitif. Keberhasilan strategi maritim bukan hanya kemampuan memenangkan konflik, tetapi juga kemampuan mencegah eskalasi, membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang kerja sama. Keenam, ketahanan maritim nasional harus dibangun melalui pendekatan whole-of-government. TNI AL merupakan komponen strategis, tetapi efektivitas ketahanan maritim juga bergantung pada kemampuan institusi pertahanan, penegakan hukum, dan aktor pemerintah lainnya untuk berbagi informasi, mengoordinasikan respons, dan membangun kerja sama lintas batas ketika ancaman bersifat transnasional (Bueger & Edmunds, 2017; Manullang, 2024)

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh dinamika lingkungan strategis terhadap ketahanan maritim nasional, mengidentifikasi peran strategis TNI AL, serta merumuskan strategi optimalisasi peran tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa dinamika Indo-Pasifik memengaruhi ketahanan maritim Indonesia melalui meningkatnya kompetisi strategis, ancaman nonmiliter lintas batas, dan ancaman hibrida serta multidomain. Ketiga kelompok tantangan tersebut berdampak pada dimensi pertahanan dan kedaulatan, keamanan dan penegakan hukum, keberlangsungan kepentingan ekonomi dan sumber daya, serta kapasitas kelembagaan dan adaptasi. Dalam menghadapi kondisi tersebut, TNI AL memiliki peran strategis melalui fungsi militer, konstabulari, dan diplomasi sesuai mandat peraturan perundang-undangan. Temuan utama penelitian adalah bahwa efektivitas peran TNI AL tidak cukup ditentukan oleh jumlah dan modernisasi alat utama sistem persenjataan, tetapi oleh keterpaduan informasi,

kapabilitas operasi, interoperabilitas, teknologi, kualitas sumber daya manusia, diplomasi, dan koordinasi kelembagaan. Sintesis analisis tersebut menghasilkan model enam pilar optimalisasi, yaitu penguatan Maritime Domain Awareness, pembangunan kekuatan berbasis kapabilitas, peningkatan interoperabilitas, transformasi teknologi dan sumber daya manusia, penguatan naval diplomacy, serta sinergi keamanan maritim nasional. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyatuan hubungan antara dinamika ancaman, mandat TNI AL, dan dimensi ketahanan maritim ke dalam satu kerangka analitis yang dapat digunakan untuk membaca prioritas penguatan peran TNI AL. Implikasi kebijakannya adalah perlunya penentuan prioritas modernisasi berdasarkan kebutuhan misi dan skenario ancaman, penguatan sistem pertukaran informasi, peningkatan kompetensi personel, pelaksanaan latihan lintas domain dan antarlembaga, serta penguatan mekanisme koordinasi sesuai kewenangan masing-masing institusi. Karena penelitian ini berbasis studi kepustakaan, penerapan model enam pilar masih perlu diuji melalui penelitian empiris mengenai kesiapan kapabilitas, efektivitas koordinasi, dan implementasi kebijakan di lingkungan TNI AL serta lembaga terkait.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama proses penyusunan penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

ASEAN. (2019). *ASEAN outlook on the Indo-Pacific*. ASEAN Secretariat.

ASEAN. (2023). *ASEAN maritime outlook*. ASEAN Secretariat.

Bueger, C. (2015a). What is maritime security? *Marine Policy, 53*, 159–164. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2014.12.005

Bueger, C. (2015b). From dusk to dawn? Maritime domain awareness in Southeast Asia. Contemporary Southeast Asia, 37(2), 157–182. https://doi.org/10.1355/cs37-2a

Bueger, C., & Edmunds, T. (2017). Beyond seablindness: A new agenda for maritime security studies. International Affairs, 93(6), 1293–1311. https://doi.org/10.1093/ia/iix174

Darwis, & Putra, B. A. (2022). Construing Indonesia's maritime diplomatic strategies against Vietnam's illegal, unreported, and unregulated fishing in the North Natuna Sea. Asian Affairs: An American Review, 49(4), 172–192. https://doi.org/10.1080/00927678.2022.2089524

International Institute for Strategic Studies. (2024). Asia-Pacific regional security assessment 2024. IISS.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Le Mière, C. (2014). Maritime diplomacy in the 21st century: Drivers and challenges. Routledge.

Manullang, A. J. (2024). The role of international cooperation in Indonesia's maritime security: Study case of MT Arman 114. Jurnal Lemhannas RI, 12(2), 117–130. https://doi.org/10.55960/jlri.v12i2.509

Payne, J. (2023). Indo-Pacific reluctance and the Gulf: An examination of maritime domain awareness as an influence shaping regional maritime security efforts. Journal of the Indian Ocean Region, 19(1), 57–71. https://doi.org/10.1080/19480881.2023.2261205

Putra, B. A. (2023). The rise of paragunboat diplomacy as a maritime diplomatic instrument: Indonesia's constabulary forces and tensions in the North Natuna Seas. Asian Journal of Political Science, 31(2), 106–124. https://doi.org/10.1080/02185377.2023.2226879

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 35.

Till, G. (2018). Seapower: A guide for the twenty-first century (4th ed.). Routledge.

United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea*. United Nations.

Wibawa, A., Iswardhana, M. R., & Chotimah, H. C. (2021). Pola interaksi antar-lembaga dan reformasi tata kelola keamanan maritim Indonesia: Bakamla RI. Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 3(3). https://doi.org/10.15575/jbpd.v3i3.14582